

PRISIP MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBAGUNAN INFASTRUKTUR DI KABUPATEN KATINGAN

(Studi Di Desa Tumbang Lahang)

***Selvia Wulandari¹⁾, Riamona Sadelman Tulis²⁾**

1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi menuju kearah yang lebih baik dan berkesinambungan (Todaro, 2006). Keberhasilan pembangunan diukur dari berbagai hal, salah satunya yaitu dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Manusia merupakan potensi dan kekayaan dari suatu negara, maka manusia harus selalu menjadi target pembangunan dari suatu negara. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi potensi bagi pembangunan suatu negara, namun sebaliknya jika sumber daya manusia disuatu negara kurang berkualitas maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan disuatu Negara. Menariknya dalam di Kabupaten Katingan masih banyak insfraktur yang masih belum terbangun dipusat Kota, masih banyak jalan-jalan yang rusak dan pembangunan insfraktur lainnya yang dapat menunjang pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Katingan. Sementara di kecamatan dan desa-desa masih banyak pembangunan insfraktur yang belum dibangun secara merata. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tumbang Lahang tahun 2021 menggunakan kemampuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan kemampuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masyarakat bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat benar-benar sesuai dengan keadaan dan kondisi pada masyarakat Desa Tumbang Lahang. Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur terserap secara optimal. Dana Desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa Tumbang Lahang untuk melaksanakan pemerataan pembangunan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN. Dana Desa Tumbang Lahang yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui APBD Kabupaten Katingan Bagian Timur pada tahun 2021 yang berjumlah Rp. 1.513.575.838,00.

Kata Kunci: Infrastruktur, Pembangunan, SDM.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan tolak ukur perkembangan suatu daerah. Otonomi daerah yang digencarkan pemerintah telah membuat sebagian besar daerah-daerah seluruh Indonesia telah melakukan pembangunan disegala sektor baik informal maupun

formal. Salah satunya adalah peningkatan pelayanan transportasi darat berupa pembangunan jalan.

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi menuju kearah yang lebih baik dan berkesinambungan (Todaro, 2006). Keberhasilan pembangunan diukur dari berbagai hal, salah satunya yaitu dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Manusia merupakan potensi dan kekayaan dari suatu negara, maka manusia harus selalu menjadi target pembangunan dari suatu negara. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi potensi bagi pembangunan suatu negara, namun sebaliknya jika sumber daya manusia disuatu negara kurang berkualitas maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan disuatu Negara (Rhama & Setiawan, 2020).

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi didalamnya terdiri atas sekumpulan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang didalamnya terdapat Pemerintah Kecamatan, dan didalam Pemerintah Kecamatan tersebut terdapat pemerintahan terendah, yaitu Pemerintah Desa. Penyelenggara Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/ Walikota, Kepala Camat dan Kepala Desa serta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pembangunan insfraktur merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik di pusat maupun didaerah. Insfraktur juga memiliki manfaat strategis yaitu salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan yang berskala besar (Setiawan, 2019).

Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan bangsa. Perkembangan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan satu sama lain, dengan kata lain ketersediaan infrastruktur juga sudah menjadi suatu tuntutan untuk menjalankan roda perekonomian suatu bangsa, karena Negara yang memiliki infrastruktur baik akan lebih dapat bersaing dibandingkan Negara yang memiliki infrastruktur yang minim.

Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mutlak dalam sistem angkutan jalan raya. Kinerja sistem transportasi jalan raya akan bergantung pada seberapa besar daya dukung prasarana jalan yang mampu disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok dalam suatu sistem transportasi. Infrastruktur jalan di Indonesia merupakan prasarana transportasi darat yang dominan digunakan oleh angkutan barang dan juga angkutan penumpang. Jalan memiliki peranan yang strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, sehingga harus dipertahankan fungsinya dengan baik melalui sistem pemeliharaan yang baik pula. Terbukti betapa besarnya peran jalan selama ini dalam mendukung mobilitas dan distribusi penumpang, barang dan jasa.

Pembangunan infrastruktur jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan; pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan; pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan, sedangkan pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi (Kodoatie, R.J., 2005). Jenis-jenis infrastruktur sebagai berikut: Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Contohnya: bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dll.

Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tetapi berguna dalam mendukung infrastruktur fisik lainnya dan berkaitan dengan masalah kepuasan publik. Contohnya: pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan komunikasi, ketersediaan saluran gas, dll.

Infrastruktur lunak berbentuk kelembagaan atau kerangka institusional dan berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya: pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, dan lain-lain.

Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Infrastruktur yang memadai menyebabkan biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga akan mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga mendorong investasi baru, lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Suroso, 2015).

Infrastruktur tidak hanya berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengatasi kesenjangan antardaerah. Ketimpangan antardaerah yang tercemin dalam perbedaan pendapatan perkapita juga menandakan perbedaan kebutuhan akan infrastruktur. Daerah dengan pendapatan perkapita rendah memerlukan porsi infrastruktur yang besar untuk irigasi, listrik, dan air bersih,

sedangkan daerah yang lebih maju cenderung membutuhkan infrastruktur transportasi, listrik dan telekomunikasi. Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu prasyarat utama untuk pembangunan yang berkualitas. Adanya infrastruktur ini maka ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat meningkat maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan perkapita. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita meningkat (Jhingan, 2012).

Kota, masih banyak jalan-jalan yang rusak dan pembangunan infrastruktur lainnya yang dapat menunjang pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Katingan. Sementara di kecamatan dan desa-desa masih banyak pembangunan infrastruktur yang belum dibangun secara merata.

TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi Pembangunan

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepskan sebagai usaha pemerintah belaka.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak

dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3).

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi. Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. (Subandi: 2011:13)

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata (Nurridha, 2014). Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Nurridha, 2014).

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersamasama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancangdan membangun perekonomian daerah (Nurridha, 2014). Pembangunan

daerah juga merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya (Munir, 2002).

Pembangunan dapat diartikan sebagai salah satu proses perubahan yang dilakukan secara sadar menuju perubahan kearah yang lebih baik (Syekh, 2011). Siagian dalam Syekh (2011) memberikan pengertian pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dapat dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah guna menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Selanjutnya Siagian dalam Syekh (2011) juga mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan sebagai suatu perubahan untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari keadaan sekarang, selain itu pembangunan diartikan sebagai suatu pertumbuhan untuk menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif serta mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengertian daerah merupakan sebagai kesatuan hukum yang mempunyai batas daerah tertentu serta mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prasangka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Syekh, 2011).

Pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional, jika pembangunan daerah gagal melakukan pembangunan maka bisa dikatakan pembangunan nasional juga tidak berhasil (Setiawan & Saefulloh, 2019). Namun harus tetap diperhatikan untuk tercapainya keberhasilan pembangunan suatu daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki. Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula.

Pengertian Infrastruktur

Pengertian infratruktur menurut Grigg (1988) adalah proses fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sosial maupun ekonomi, seperti menyediakan transportasi, jalan, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas

umum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Infrastruktur sebagai proses juga merupakan bagian seperti sarana prasarana yang saling berhubungan. Infrastruktur juga sangat berperan penting dalam proses sosial maupun ekonomi dikalangan masyarakat. Maka dari itu, infrastruktur dijadikan sebagai dasar dalam menentukan keputusan.

Namun menurut *American Public Works Association* (Stone, 1974:12), infrastruktur diartikan sebagai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pelaku dalam pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah, tenaga listrik, dalam pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Sedangkan menurut Moteff (2003), infrastruktur tidak hanya mengurus dalam hal ekonomi maupun sosial, tetapi infrastruktur juga mengurus terhadap masalah pertahanan dan keberlanjutan dalam pemerintah.

Disini menjelaskan bahwa infrastruktur ini tidak hanya fokus terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti masalah sosial dan ekonomi. Tetapi dalam sudut pandang yang lain, infrastruktur juga fokus terhadap masalah pertahanan dan keberlanjutan dalam suatu pemerintahan. Selanjutnya Vaughn and Polland (2003) juga berpendapat bahwa infrastruktur secara umum memiliki beberapa cakupan dalam pelayanan umum, meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, bangunan umum, dan lain lain yang bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat.

J'afar M. (2007) mengemukakan infrastruktur memiliki fungsi positif terhadap perkembangan serta pertumbuhan ekonomi jangka pendek dalam menciptakan lapangan kerja konstruksi yang akan mendukung perusahaan disektor terkait. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur mendefinisikan infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik (Setiawan & Rhama, 2021). Namun menurut Soerjo (2007), infrastruktur dipahami sebagai material fisik, seperti jalan, jaringan drainase, instalasi listrik dan jaringan air minum yang berhubungan dengan permasalahan infrastruktur sipil dan perkotaan. Tetapi infrastruktur juga berperan

terhadap pembangunan dan prosuder operasi. Konteks ini dikenal sebagai istilah Hard Infrastruktur dan Soft Infrastruktur yang mana kedua jenis ini saling berinterkaitan dalam menciptakan pelayanan infrastruktur secara penuh dan memiliki cakupan yang luas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Alasan bagi penulis metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Menurut harga, PDRB dibagi atas dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Sehingga dengan adanya perhitungan PDRB sebagai proxy pendapatan regional Kabupaten Katingan dengan lebih terstruktur dan tepat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan Tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 6,31 menjadi 6,55. Kenaikan tersebut

dipengaruhi oleh kenaikan pertumbuhan pada sektor-sektor antara lain pertanian, pertambangan dan penggalian; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor-sektor jasa. Pendapatan regional perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan/ kemakmuran masyarakat dari aspek pendapatan. Pendapatan regional per kapita yang meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat perkembangan pendapatan penduduk. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa PDRB per kapita belum memperhitungkan pendapatan yang keluar dari Kabupaten Katingan atau pendapatan yang masuk ke Kabupaten Katingan (Net Factor Income From Abroad).

Laju pertumbuhan PDRB per kapita dipengaruhi dua faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk maka pertumbuhan PDRB per kapita akan tinggi, demikian pula sebaliknya. Kabupaten Katingan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 telah mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” yang mengartikan bahwa hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, ini berarti berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan oleh pemerintah Kabupaten Katingan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan baik. Kalaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Ini merupakan motivasi bagi Kabupaten Katingan untuk semakin tertib dalam pengelolaan administrasi keuangan meskipun di sisi yang lain upaya realisasi dan penyerapan anggaran agar terus ditingkatkan sehingga sampai triwulan III Tahun Anggaran 2014 nanti penyerapan anggaran dapat mencapai 80 persen dari pagu tahun 2014.

APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp. 1.114.837.188.000,-. Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk berdasarkan golongan pengeluaran per kapita sebulan di perkotaan paling banyak di pengeluaran lebih dari satu juta rupiah, sebesar 36,85 persen penduduk. Diikuti oleh golongan pengeluaran 300.000-499.999, 500.000-749.999, 200.000-299.999 dan

150.000-199.999 rupiah, masing-masing sebesar 24,46 persen, 17,35 persen, 8,28 persen, 8,17 persen, 4,90 persen.

Berdasarkan data Susenas 2013, pengeluaran terbesar untuk bahan makanan adalah komoditas padi-padian, sedangkan untuk non makanan adalah komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga. Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan pada tahun anggaran 2021 menurut Peraturan Bupati Sekariyas Bagian Timur Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif bahwa anggaran Dana Desa untuk setiap desa tahun anggaran 2021 sebesar Rp. Rp 1.513.575.838,00 Dana Desa tersebut langsung diterima 100% oleh Pemerintah Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan.

Dana Desa sebesar Rp. 1.513.575.838,00 tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengalokasian dana Desa terbagi menjadi dua, yaitu sebesar 70% dan 30%. Alokasi dana Desa sebesar 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta 30% digunakan untuk belanja perangkat Desa dan kegiatan operasional perangkat Desa. Pembangunan Desa yang difokuskan pada bidang infrastruktur melibatkan masyarakat didalam pembangunan, masyarakat sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang dituturkan oleh Diagon selaku Kepala Urusan Program Pembangunan Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, Hal ini dilakukan karena pembangunan Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan dilakukan secara terpadu dengan gotong-royong sesuai dengan visi dari Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan yang dengan semangat gotong-royong menuju terwujudnya masyarakat mandiri dan produktif.

Pembangunan secara gotongroyong adalah pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok rukun tetangga (RT) atau kelompok Dusun yang ada di Desa Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, Tumbang Lahang. Mengingat alokasi dana Desa digunakan untuk mensejahterakan

masyarakat Desa melalui pembangunan, maka semangat kegotongroyongan selalu ditunjukkan oleh masyarakat Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan tahun 2021.

Pembangunan infrastruktur secara terpadu di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan adalah pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan secara bersamaan dan dilakukan secara serentak di sebuah rukun tetangga maupun Dusun, Bertujuan agar pembangunan dapat berjalan dengan waktu yang sama, sehingga Pemerintah Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan dapat dengan mudah melakukan monitoring dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan hasil dari sebuah pembangunan infrastruktur tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang menggunakannya.

Pembangunan secara serentak sengaja dilakukan agar tidak terjadi penutupan akses fasilitas publik yang mengganggu kegiatan dari masyarakat Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, selain itu tujuan dari pembangunan infrastruktur secara terpadu dengan gotong-royong untuk pengefektifan dan pengefisiensi biaya, mengingat pembangunan Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan terbagi atas beberapa titik pembangunan yang berbeda setiap wilayahnya, baik itu wilayah Rukun Tetangga ataupun wilayah Dusun. Hal tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan dalam membagi dana Desa, sehingga menganjurkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur secara gotong-royong.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan mendapatkan monitoring oleh penyelenggara pembangunan infrastruktur Desa. Monitoring pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk memantau pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung. Selain itu, monitoring bertujuan untuk melihat tenaga kerja yang digunakan oleh sebuah Rukun

Tetangga (RT) atau Dusun dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau tidak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka, Hasil sebuah pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan pada tahun 2021 sesuai dengan permintaan masyarakat sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prinsip manajemen dalam proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Katingan (studi di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah):

1. Partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat sangat mempengaruhi dan bahkan menghambat pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan, perencanaan pembangunan yang disusun oleh masyarakat sendiri sangat memerlukan partisipasi dari masyarakat tersebut, sedangkan pelaksana pada sebuah pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang akan bekerja baik itu dengan gotongroyong atau dibantu tenaga pokok, maupun pembangunan yang dilaksanakan secara gotong-royong secara penuh oleh masyarakat setempat.
2. Kinerja buruh bangunan, pemerintah Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan memberikan kewenangan kepada masyarakat di tingkat Dusun dan Rukun Tetangga (RT) dalam pelaksana pembangunan infrastruktur. Pemerintah Desa memberikan anggaran untuk jasa buruh bangunan dalam pelaksana pembangunan infrastruktur, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah dengan memperhatikan swadaya dan swakarsa yang dimiliki oleh masyarakat.

REFERENSI

- Aziz, Iwan J. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: peran dan kontribusi*. Emil Salim. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Aditya Media Effendi Uchjana. 2012. *Hubungan Masyarakat Studi Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Azwar ,S. 2001. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Medis Group.
- Gunawan, Imam. 2013. *Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Bumi aksara.
- Jamal Erizal. 2009. Membangun Momentum Baru Pembangunan Pedesaan Di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 28(1), 7-14.
- Koentjaraningrat. 1981. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Manan, B. 1994. *Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya..
- Rhama, B., & Setiawan, F. (2020). Assessing Public Private Partnership in Indonesia Tourism. *Policy & Governance Review*, 4(3), 197-209.
- Setiawan, F., & Rhama, B. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol*, 5(01).
- Setiawan, F. 2019. Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke-3 dalam Teori Modernisasi terhadap Administrasi Pembangunan di Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 1-11.
- Setiawan, F., & Saefulloh, A. 2019. Kolaborasi yang dilaksanakan di kawasan wisata dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. *Jurnal Administratio*, 10(2).
- Widjaja 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT Grapindo Persada.